

BAB II

LAHIRNYA ORGANISASI KELASKARAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Organisasi perempuan dan kelaskaran yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi sudah muncul dan ada pada abad ke 19 hingga akhir abad ke 20. Sejarah mencatat, dinamika serta munculnya organisasi perempuan ini erat kaitannya dengan masa pergerakan kebangsaan Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan *Indische Partij* pada rentang tahun 1908 hingga 1920.²⁶

Pada era penjajahan kolonial tokoh pergerakan perempuan yang dianggap sebagai perintis serta pelopor gerakan perempuan di Indonesia adalah sosok perempuan Jawa yang bernama R.A. Kartini. Dapat dikatakan demikian, karena R.A. Kartini merupakan tokoh *feminis* terkemuka dari zamannya yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dalam biografi Kartini (1879-1904) beliau

²⁶ Leirissa, R.Z. *et. al.*, “*Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*”, (Jakarta: ISDN, 1989), hlm. 126. Momentum yang tepat munculnya pergerakan organisasi kaum perempuan di Indonesia pada masa kolonial yaitu era awal abad ke-20, dengan berdirinya Budi Utomo, hal ini dikarenakan dalam sejarah pergerakan Indonesia dianggap sebagai pelopor kebangkitan bangsa adalah Budi Utomo yang anggotanya terdiri dari golongan masyarakat priyayi dan intelektual Jawa mempunyai pandangan baru tentang perempuan, selain itu, Budi Utomo beranggapan bahwa perubahan dan perbaikan adalah menyangkut laki-laki dan perempuan.

merupakan anak kedua (perempuan) dari Bupati Jepara, sebuah daerah yang berada di Pantai Utara Jawa.²⁷

Usaha nyata yang dilakukan oleh Kartini adalah dengan membuka sekolah yang pertama untuk gadis-gadis pribumi di pekarangan rumahnya. Dengan cerdas, sosok Kartini mengambil pendidikan sebagai titik strategis untuk mengeluarkan perempuan dari lingkungan budaya dan tradisinya. Secara tepat Kartini menempatkan permasalahan penindasan perempuan sebagai bagian dari permasalahan sistem budaya masyarakatnya, karena dengan pendidikan dapat mengubah sistem nilai yang ada di masyarakatnya, selain itu juga dapat menawarkan bagi kaum perempuan untuk emansipasi dan aktualisasi.²⁸

A. Organisasi Perempuan Pada Masa Kolonial

Organisasi perempuan yang berdiri pada masa kolonial memiliki beragam tujuan yang ingin dicapai. Organisasi perempuan yang berkembang pada masa ini lebih menitik beratkan kepada perbaikan kedudukan sosial perempuan dalam perkawinan dan keluarga, serta meningkatkan kecakapannya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan jalan meningkatkan pendidikan dan pengajaran yang disertai dengan peningkatan keterampilan.²⁹ Ini artinya, organisasi-organisasi

²⁷ Risdha Nugroho Budiyanto, *Aktivitas Gerwani Di Kota Semarang Tahun 1950-196*, (Semarang: Skripsi Program Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hlm. 64-65. Skripsi tidak diterbitkan.

²⁸ Fauzi Ridjal, dkk., *op.cit.*, hlm. 95.

²⁹ Yulianti., *op.cit.*, hlm. 1.

perempuan yang berdiri pada masa kolonial masih berkuat pada masalah domestik yang dihadapi oleh perempuan.

Keadaan mulai berubah setelah adanya sumpah pemuda pada tahun 1928, hal ini dikarenakan kesempatan belajar yang makin berkembang, tidak terbatas pada lapisan atas saja, melainkan juga berkembang ke golongan bawah. Dampaknya adalah dalam segi kuantitas semakin banyak perempuan yang mendapat pendidikan, dan sadar untuk berorganisasi. Efeknya adalah meningkatnya jumlah organisasi perempuan, demikian juga cara perjuangan dan ruang lingkup yang semakin luas, tidak hanya mengurus masalah domestik saja, akan tetapi juga pada ranah publik.

Pada awalnya para tokoh perintis pergerakan perempuan di Indonesia belum mempunyai perkumpulan atau organisasi perempuan, dengan kata lain berjuang untuk orang-perorangan, akan tetapi dalam kenyataannya kaum perempuan juga mengangkat senjata bahu-membahu dengan kamu pria melawan penjajah Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa kaum perempuan tersebut memberikan inspirasi bagi generasi perempuan selanjutnya untuk berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Hal demikian terjadi pula pada para tokoh perintis pergerakan perempuan sesudah masa Politik Etis yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dengan menjadi teladan dan dorongan bagi kaum perempuan untuk meneruskan jejaknya.³⁰ Kaum perempuan berjuang untuk emansipasi dan partisipasi dalam membangun kemandirian kaumnya,

³⁰ Sukanti Suryochondro., *op., cit.*, hlm. 84-85.

kemajuan bangsa serta kemerdekaan tanah airnya. Sehingga muncul dan tumbuh hasrat memajukan “emansipasi nasional”.

Muncul dan tumbuh-kembangnya hasrat “emansipasi nasional” didasarkan atas pengaruh dan warisan cita-cita dari perjuangan Kartini yang berkumandang menembus batas-batas kamar pingitannya serta erat kaitannya dengan periode kebangkitan dan kesadaran nasional yang diprakarsai oleh Budi Utomo sehingga secara tidak langsung muncul juga pergerakan kaum perempuan demi meningkatkan kemajuan kaumnya. Atas inisiatif dan seruan ketiga saudara Kartini, yaitu Roekmini, Kartinah, dan Soemantrie maka pada tahun 1912 didirikan perkumpulan atau organisasi perempuan pertama di Jakarta dengan nama “Poetri Mardika”.³¹

Dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu mulai muncul organisasi-organisasi perempuan yang lain seperti, “Pawiyatan Wanito” yang berdiri di Magelang Jawa Tengah pada tahun 1915, “Wanita Hadi” di Jepara tahun 1915, “Purborini” di Tegal tahun 1917, “Wanita Susilo” di Pemalang tahun 1918, “Darmo Laksmi” di Salatiga, “Karti Woro” dan “Budi Wanita” di Solo, “Wanita Kencono” di Banjarnegara, “Panti Krido Wanita” di Pekalongan, dan “Kesumo Rini” di Kudus. Selain itu, juga berdiri organisasi “Wanita Rukun Santoso” di Malang, “Putri Budi Sejati” di Surabaya tahun 1919, “Wanita Mulyo” di Yogyakarta tahun 1920, “Wanita Utomo” di Yogyakarta tahun 1921, “Wanita

³¹ *Ibid.*, Organisasi perempuan dengan selektif menerima budaya asing, misalnya pendidikan Barat, penghargaan yang lebih tinggi terhadap perempuan, pengorganisasian perkumpulan, tetapi kepada politik dalam arti luas belum dilakukan, kecuali tindakan yang pernah dilakukan oleh “Putri Mardika” tahun 1915 yang mengajukan mosi kepada Gubernur Jenderal agar perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang sama di dalam hukum.

Taman Siswa” tahun 1922, “Aisyiyah” di Yogyakarta tahun 1917, “Wanita Katholik” di Yogyakarta tahun 1924, “*Jong Islamiten Bond Dames Afdeeling*” di Jakarta tahun 1925.³²

Selain itu, adapun juga berdiri pergerakan organisasi perempuan di Pulau Sumatera antara lain “KAS” (Kerajinan Amai Setia) yang didirikan tahun 1914, “Keutamaan Istri” di Medan, “Istri Sumatera”, “PARMI” (Partai Muslimin Indonesia) Bagian Istri, “Persatuan Istri Andalas”, dan sebagainya. Di wilayah Sulawesi berdiri organisasi-organisasi perempuan antara lain “PIKAT” (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya) di Manado tahun 1917, “Sarekat Rukun Istri” di Makassar, serta di daerah Kalimantan berdiri organisasi “Wanita Kencono”, selanjutnya di Bali berdiri organisasi “Perukunan Istri Denpasar”.³³

Tujuan dari pembentukan semua organisasi-organisasi perempuan sebelum tahun 1928 masih bersifat kedaerahan atau kesukuan adalah ingin menggalakan pendidikan dan pengajaran bagi kaum perempuan, perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga serta untuk meningkatkan kecakapan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi kemajuan pergerakan organisasi perempuan pada masa tahun sebelum 1928 dapat dikatakan lamban.³⁴ Hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya sekolah-sekolah untuk perempuan pribumi.

³² Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 16-24.

³³ *Ibid.*, Untuk organisasi perempuan diluar Jawa, banyak membuka sekolah untuk pribumi yang dilakukan oleh para *zending* dan *missi* selain oleh individu, dan ternyata jumlah muridnya melebihi jumlah murid yang ada di Jawa. Pada tahun 1910 di Jawa dan Madura jumlah muridnya hanya 2010 orang, sedangkan jumlah murid luar Jawa dan Madura tahun 1908 sudah mencapai 12.276 orang.

³⁴ [http://acehmarxist.wordpress.com/2007/12/13/%e2%80%9cSepintas gerakan wanita Indonesia dalam perkembangan sejarah/html](http://acehmarxist.wordpress.com/2007/12/13/%e2%80%9cSepintas%20gerakan%20wanita%20Indonesia%20dalam%20perkembangan%20sejarah/html). Diakses pada hari Jum’at, 1 Februari 2013., Pukul 15.00 WIB.

Selain itu kadang-kadang juga tidak adanya izin dari orang tua bagi keluarga golongan atas serta sangat diperlukakannya tenaga perempuan untuk membantu kegiatan orang tua bagi keluarga golongan bawah. Adapun juga sistem adat dan tradisi yang masih sangat kuat sangat menghambat kemajuan perempuan pada masa tersebut.

Jumlah organisasi-organisasi perempuan di Indonesia sesudah tahun 1928 bertambah banyak. Fenomena ini disebabkan oleh kesediaan kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan organisasi makin meningkat dan kecakapan berorganisasipun semakin bertambah maju. Selain itu, kesempatan belajar yang diberikan semakin meluas dan berkembang ke lapisan bawah.³⁵

Dengan demikian jumlah perempuan yang mampu bergerak di bidang sosial politik juga bertambah luas dan tidak lagi terbatas kepada lapisan atas saja. Contohnya adalah mulai berdiri perkumpulan dan organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang sosial-politik seperti: Partai Komunis Indonesia (P.K.I), Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah dan Sarekat Ambon yang membentuk divisi untuk perempuan. Tugas dari divisi perempuan ini adalah menyebarkan cita-cita gagasan organisasi dan mempertinggi hal-hal yang berhubungan dengan bidang ke-perempuan-an.³⁶

Semakin banyaknya kaum perempuan yang mendapat pendidikan pada masa kolonial tersebut ternyata mempunyai dampak negatif yaitu menimbulkan masalah baru. Dapat dikatakan demikian, karena tidak semua masyarakat dapat

³⁵ Ohorella, G.A. *et. al.*, *Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 8.

³⁶ *Ibid.*,

menerima perubahan-perubahan yang berlangsung pada masa tersebut. Sehingga timbul perasaan tidak senang apabila perempuan dapat mandiri dan mampu mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Selain itu, muncul rasa kekhawatiran dalam masyarakat pribumi di Hindia Belanda bahwa pendidikan yang diterima oleh kaum perempuan pada masa tersebut dapat menyimpang dan tidak sesuai dengan adat-istiadat nilai ketimuran.³⁷ Sikap pro dan kontra yang muncul di masyarakat lebih diarahkan kepada para kaum perempuan pribumi terdidik.

Selain dampak negatif tentang pendidikan untuk kaum perempuan di Indonesia ada juga dampak yang positif, misalnya muncul kesadaran dan kepekaan kaum perempuan yang lebih besar akan masalah yang dihadapi perempuan pada umumnya dan terutama pada permasalahan yang sedang dihadapi bangsa mereka yang masih terdiskriminasi oleh bangsa lain. Kesadaran yang muncul dari fenomena di sekitar mereka memberi inspirasi kepada para kaum perempuan terdidik bahwa cara kerja secara individual menghasilkan efek yang kurang memuaskan, dan untuk mendapatkan cita-cita bagi kemajuan perempuan dan meninggikan derajat bangsanya mereka menganggap perlunya kerjasama yang luas dan lebih besar dalam bentuk organisasi agar hasilnya lebih tampak. Caranya dengan membuat semacam perkumpulan atau wadah bagi perempuan

³⁷ Lihat: Muharam., E., *Kebijaksanaan Pemerintah Kolonial Belanda Dalam Bidang Pendidikan Wanita Pribumi di Hindia Belanda 1900-1942*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1996), hlm. 138. Tesis tidak diterbitkan.

seluruh Indonesia sehingga pada tanggal 22-25 Desember 1928 diselenggarakan kongres pertama organisasi perempuan Indonesia di Yogyakarta.³⁸

B. Kongres Perempuan Indonesia

Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928, dengan tokohnya Nyi Hajar Dewantara, Ny. Sukanto dan Nn. Suyatin, puncak kegiatan yang terjadi pada periode ini adalah dua bulan setelah Kongres Pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda.³⁹ Kongres ini merupakan lembaran sejarah baru bagi gerakan perempuan Indonesia. Dapat dikatakan demikian, karena organisasi perempuan dapat menggalang kerjasama secara khusus untuk kemajuan perempuan dan pada masyarakat secara umumnya.⁴⁰

Sesudah adanya kongres perempuan Indonesia pertama ini organisasi perempuan di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan gerakan perempuan tersebut terlihat dengan makin banyaknya perkumpulan-perkumpulan perempuan yang berdiri sendiri dalam lingkup *skop* yang kecil. Fenomena ini hampir terjadi di semua tempat terutama kota-kota terdapat perkumpulan perempuan. Tujuan yang diusung dari perkumpulan-perkumpulan perempuan ini

³⁸ Doran, Christine, *Perempuan dan Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Argu, 1994), hlm. 1-2.

³⁹ Suyatin Kartowijono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982), hlm. 6. Peristiwa Sumpah Pemuda ini menurut Ki Hajar Dewantara sebagai tonggak sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia.

⁴⁰ Nani Soewondo, *op. cit.*, hlm. 198. Titik kulminasi Kongres Perempuan Indonesia terjadi tahun 1928 yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Organisasi perempuan yang diantaranya bergelut di bidang domestik mulai membentuk suatu persatuan yang mempunyai jiwa kesadaran nasional pada tanggal 22 Desember 1928.

sama dengan organisasi perempuan pada masa kolonial, yaitu sebagai proses belajar untuk kepandaian putri serta berperan dalam kehidupan kemasyarakatan.⁴¹

Asas pergerakan kebangsaan Indonesia merupakan ciri utama dari kesatuan pergerakan perempuan Indonesia pada masa ini. Pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan pada kongres pertama ini adalah membahas tentang kedudukan wanita dalam perkawinan, poligami dan *koedukasi*.⁴² Ada sekitar tiga puluh organisasi perempuan yang menghadiri kongres tersebut serta sepakat untuk menyetujui dan menerima mosi mengenai reformasi perkawinan dan pendidikan.

Seiring dengan perkembangan hasil dalam kongres pertama tersebut yang menyangkut tentang mosi mengenai poligami, ternyata terjadi perdebatan yang sengit antara organisasi perempuan Islam dengan organisasi Kristen dan “non agama” yang menyangkut permasalahan sentral bagi kaum perempuan pada masa tersebut yaitu poligami. *Friksi* yang terjadi antara kedua organisasi keagamaan ini tidak berlangsung cukup lama dan dapat diselesaikan dengan baik.

Perdebatan ini terjadi karena organisasi perempuan Kristen dan non-agama yang sangat aktif memperjuangkan dan melawan tindakan poligami terhadap kaum perempuan menilai poligami sebagai penghinaan terhadap kaum perempuan yang tidak bisa dimaafkan, sementara disisi lain organisasi-organisasi perempuan

⁴¹ Saskia. E. Wieringa., *op., cit.*, hlm. 55. Masing-masing organisasi perempuan yang muncul memiliki persamaan kepentingan yang diperjuangkan oleh setiap organisasi, baik organisasi yang agamis maupun non agama, dan yang lokal yaitu bagaimana seorang perempuan menjadi seorang Ibu dan istri yang baik, mendapat pendidikan kerumahtanggaan seperti keterampilan mengasuh anak dan menjahit. Jadi masalah yang diperjuangkan masih berkisar ranah domestik, peran esensial seorang wanita konstruksi budaya masyarakatnya.

⁴² Koedukasi adalah lelaki dan wanita bersekolah bersama-sama, dalam satu kelas.

Islam hanya menginginkan perbaikan kondisi di dalam poligami, bukan menghapuskan lembaga poligami itu sendiri. Upaya-upaya untuk menyatukan perbedaan pendapat dari kedua organisasi perempuan tersebut segera dilakukan dengan mengambil keputusan yang nyata, hal itu tercermin dengan adanya penyelenggaraan musyawarah, serta melakukan rapat-rapat yang membahas masalah tersebut.⁴³

Dinamika selanjutnya yang terjadi dalam menyikapi hasil kongres pertama adalah muncul lagi permasalahan yaitu adanya ketegangan antara organisasi-organisasi perempuan yang berhaluan Islam dengan organisasi perempuan yang berasaskan nasionalis serta organisasi Kristen yang menentang tentang *koedukasi* serta penghapusan poligami bagi kaum perempuan. Sehingga sebagai jalan keluarnya kemudian dibentuk Persatuan Perempuan Indonesia (PPI), organisasi ini merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan di Indonesia. Pada tahun selanjutnya di Jakarta terjadi perubahan nama federasi ini menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII).⁴⁴ Usaha kongkrit yang dilakukan oleh PPII sebagai suatu organisasi perempuan adalah dengan menerbitkan majalah sendiri, giat mengajarkan pendidikan bagi kaum perempuan serta membentuk panitia perdagangan perempuan dan anak-anak.⁴⁵

⁴³ Lihat: Saskia. E. Wieringa, *Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*, (Jakarta: Garba Budaya Kalyanamitra, 1998), hlm. 10.

⁴⁴ Perubahan mengenai nama ini sebagian disebabkan karena perkembangan kosakata, akan tetapi yang lebih penting adalah perubahan pada struktur organisasi. Perubahan nama ini berhubungan pula dengan perkembangan yang terjadi pada masing-masing perkumpulan perempuan yang tergabung. Lihat: Sukanti Suryochondro., *op., cit.*, hlm. 90.

⁴⁵ Saskia, E. Wieringa, 1999, *op.,cit.*, hlm. 129-130.

Hanya ada satu organisasi perempuan yang tidak hadir pada sidang-sidang nasional organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam PPII ini adalah Isteri Sedar, organisasi ini merupakan organisasi perempuan yang paling *radikal* pada saat tersebut. Organisasi Istri Sedar tidak mau untuk berkompromi jika mengenai masalah-masalah poligami dan perceraian, yang nantinya dapat menimbulkan perbedaan mendalam di antara organisasi-organisasi perempuan Islam dan lain-lainnya.⁴⁶

Isteri Sedar adalah satu-satunya organisasi *radikal* yang secara terbuka dan sistematis mengecam politik pemerintah kolonial Belanda, dan memberi perhatian pada perjuangan anti *kapitalisme*.⁴⁷ Organisasi Istri Sedar menyatakan bahwa perempuan di Indonesia harus mampu memainkan peranan aktif dalam bidang politik. Hal itu didasarkan pada pemikiran, bahwa “hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran kaum laki-laki dan wanita yang bersatu padu akan sanggup memberikan persamaan hak dan tindakan kepada rakyat Indonesia”. Selain itu, Istri Sedar juga memperjuangkan nasib kaum perempuan *proletar* di Indonesia harus segera diperbaiki.⁴⁸ Dalam hal perjuangan kemerdekaan Indonesia organisasi perempuan Istri Sedar juga memberikan penghargaan kepada kaum perempuan yang mempunyai kedudukan sama dengan kaum laki-laki dalam proses perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Organisasi ini juga bersikap kritis terhadap norma-norma adat, tradisi dan agama yang pada

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 131.

⁴⁷ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: PT.Dian Rakyat, 1967), hlm. 166.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 167.

prakteknya merugikan kaum perempuan. Hal ini terlihat dari sikap organisasi yang selalu memberikan kritikan tajam untuk menyerang *imperialisme* dan *kolonialisme* yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.⁴⁹

Perkembangan selanjutnya dari usaha organisasi pergerakan perempuan di Indonesia adalah adanya penggabungan beberapa organisasi perempuan yang tidak berasaskan keagamaan pada bulan Juni 1932 dengan nama Istri Indonesia (II). Misi dari organisasi ini untuk memperjuangkan bangsa Indonesia yang merdeka berdasarkan asas demokrasi. Usaha yang nyata dilakukan organisasi perempuan ini berusaha untuk menempatkan kaum perempuan untuk menduduki jabatan di dalam dewan-dewan kota yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Selain itu juga berusaha memperhatikan peraturan yang dibuat pemerintah kolonial saat itu yang selalu merugikan kaum perempuan dalam hal permasalahan perkawinan dan perceraian. Perkembangan selanjutnya adalah melakukan Kongres Perempuan Indonesia berikutnya di Jakarta tahun 1935, kemudian kongres dilanjutkan di Kota Bandung pada tahun 1938, serta pada tahun 1941 diadakan kongres di Semarang. Hal ini menunjukkan perjuangan organisasi perempuan yang mengusung perjuangan nasional melalui media kongres yang diadakan beberapa kali sangat terlihat garis perjuangan kaum perempuan di Indonesia mengalami peningkatan.

Pada kongres yang dilaksanakan di Jakarta tahun 1935 terjadi perubahan nama dari PPII menjadi dan terbentuk Kongres Perempuan Indonesia (KPI). Hasil kongres lebih ditujukan kepada kaum perempuan dan golongan miskin, akan

⁴⁹ Yety Rochwulaningsih, et al., *op.,cit.*, hlm. 43.

tetapi kongkrit yang terjadi dilapangan anggotanya masih berasal dari lapisan atas, serta tuntutan yang disuarakan sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan kaum wanita golongan atas. Selanjutnya pada saat pelaksanaan KPI ke III di Bandung pada tanggal 23-27 Juli 1938, salah satu hasil kongres yang berhasil diputuskan adalah menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu bagi bangsa Indonesia.⁵⁰

Sesudah adanya beberapa kongres perempuan yang dilakukan serta diselenggarakan oleh kaum perempuan di Indonesia diatas, pada tahun 1940 di Jakarta untuk pertama kalinya berdiri suatu organisasi perempuan yang anggotanya terdiri atas para kaum perempuan yang bekerja diluar rumah. Organisasi perempuan tersebut dinamakan "Perkumpulan Pekerja Perempuan Indonesia". Anggotanya terdiri dari kaum perempuan yang bekerja pada kantor pemerintah atau swasta misalnya guru, perawat, dan pegawai kantor. Jika dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu masih belum dikatakan sebagai organisasi profesi. Dapat dikatakan demikian, karena secara umum

⁵⁰ Kowani., *op., cit.*, hlm. 45-55. Mayoritas peserta kongres datang dari perempuan kalangan atas, meskipun organisasi perempuan kiri mulai mewarnai. Kongres Perempuan II di Jakarta (1935) dan Kongres III di Bandung (1938) menunjukkan kecenderungan yang semakin populis dari gerakan perempuan. Orientasi kepada perempuan kelas bawah mulai menguat, meski dalam hal program tidak selalu konsisten. Yang memilukan adalah tidak ada satupun organisasi yang tergabung dalam Kongres Perempuan Indonesia (KPI) mengeluarkan pernyataan terbuka menolak dan melawan penjajahan kolonial, kecuali Sarekat Rakyat dan Istri Sedar. Kedua kelompok ini secara konsisten mendorong agar kaum perempuan terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Seperti yang diucapkan Soekarno pada 1932: "...Saat ini perjuangan kaum perempuan yang terpenting bukanlah demi kesetaraan, karena di bawah kolonialisme laki-laki juga tertindas. Maka, bersama-sama dengan laki-laki, memerdekakan Indonesia. Karena hanya dibawah Indonesia yang merdekalah, kaum perempuan akan mendapatkan kesetaraannya..." Ditengah-tengah ombak besar nasionalisme yang siang malam menyerbu mimpi-mimpi para pemuda, mayoritas kelompok lainnya memfokuskan diri semata pada pendidikan, pemberantasan buta huruf dan soal-soal keperempuanan. Meskipun hal ini juga amat penting, namun tanpa keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan, semua persoalan kesetaraan akan gagal menghasilkan pembebasan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun.

kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut lebih ditekankan pada bidang pendidikan keterampilan perempuan dan pemupukan kesadaran kebangsaan Indonesia sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan lainnya.⁵¹

Ini artinya, secara tipologi serta ide pembentukan organisasi-organisasi perempuan Indonesia melalui beberapa kongres perempuan yang telah dilakukan lebih bertujuan untuk memajukan kaum perempuan itu sendiri. Selain itu, gagasan untuk membentuk suatu organisasi dalam era pemupukan kesadaran kebangsaan Indonesia pada waktu tersebut tidak muncul hanya dari kalangan perempuan sendiri, akan tetapi terdiri dari beberapa organisasi yang berkembang pada era tersebut, misalnya organisasi massa, organisasi politik baik yang bersifat agama maupun *sekuler* serta organisasi pemuda. Hal ini disebabkan karena organisasi perempuan yang terhimpun dalam kongres perempuan dianggap dapat menyalurkan cita-cita organisasi, ideologi partai bahkan ajaran agama dan tidak menuntut persyaratan yang tinggi bagi anggotanya.⁵²

Dalam rentang waktu tahun 1928 hingga 1940 perkembangan organisasi pergerakan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan. Ini terlihat dari tumbuhnya semangat nasionalisme kebangsaan untuk mencapai Indonesia merdeka dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda dengan banyaknya organisasi-organisasi perempuan yang berdiri melalui kongres. Namun sampai pada masa kependudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 hal *klise* terjadi, bahwa

⁵¹ Saskia. E. Wieringa, 1999, *op. cit.*, hlm. 141.

⁵² Muharam., *op. cit.*, hlm. 161.

organisasi perempuan di Indonesia mengalami kemandegan dan degradasi karena dilarang beroperasi oleh pemerintah Jepang.

C. Organisasi Perempuan Pada Masa Jepang

Pemerintah Kolonial Belanda menyerah kepada Jepang pada bulan Maret 1942. Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam perkembangan sejarah Indonesia.⁵³ Seperti halnya Belanda, Jepang berusaha menggunakan tenaga manusia dan khususnya sumber daya alam yang dimiliki negara ini bagi kemajuan mereka sendiri, dalam hal ini usaha perang negara penjajah. Akan tetapi berbeda dengan Belanda, pihak Jepang hendak mencapai tujuannya tersebut dengan melakukan pengerahan tenaga penduduk pribumi, terutama penduduk di Jawa dan membujuk para pemimpin nasionalis sebelum perang agar bisa memobilisasi massa dari penduduk di Indonesia untuk kepentingan Jepang.⁵⁴

Jepang menciptakan berbagai semboyan anti-Barat untuk menggugah semangat politik sebagian besar penduduk di Indonesia. Berbagai organisasi pemuda dibentuk, tujuannya untuk mengindoktrinasi, melatih serta mempersenjatai ribuan pemuda dan pemudi di Indonesia. Dalam usahanya

⁵³ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 405.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 406. Pada umumnya Pulau Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting. Sumber dayanya yang utama adalah manusia. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang dalam membangkitkan rasa kesadaran nasional jauh lebih mantap di Jawa daripada daerah lain di Indonesia. Selain itu strategi lain yang digunakan oleh Jepang dengan masuk ke para pemimpin bangsa ini karena mereka menganggap para pemimpin mempunyai kekuatan untuk dapat memobilisasi masa atau penduduk di Indonesia sehingga secara tidak langsung dengan cara ini memudahkan Jepang dalam membuat kebijakan-kebijakan.

tersebut Jepang menanamkan semangat persaudaraan Asia Raya, Jepang mengobarkan hasrat untuk kemerdekaan. Kemungkinan ke arah kemerdekaan juga dibuat lebih terbuka.⁵⁵ Dapat dikatakan demikian, karena berbagai ormas yang dibentuknya dapat dijadikan jalan bagi para pemimpin Indonesia, pada umumnya dari masyarakat atas dan menengah untuk dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat lapisan bawah.

Semasa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 semua organisasi perempuan Indonesia dilarang beroperasi dan melakukan kegiatan apapun kecuali atas perintah dan izin pemerintahan Jepang. Ada dua strategi dan taktik yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar dapat merangkul bangsa Indonesia. *Pertama*, Bahasa Belanda dilarang untuk digunakan dan bahasa Indonesia secara resmi digunakan sebagai bahasa komunikasi umum oleh masyarakat Indonesia. *Kedua*, sistem sekolah yang berlandaskan dan didirikan oleh Belanda seperti ELS, HIS, HCS dan lainnya dibubarkan. Serta diganti dengan Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun, SMP, SMA, sekolah Guru, dan sekolah kejuruan.⁵⁶

Hanya ada satu organisasi perempuan di bawah kekuasaan Jepang yang diizinkan hidup dan bertahan dalam melakukan aktifitas kegiatannya yaitu *Fujinkai*⁵⁷ yang dibentuk di daerah-daerah dengan ketuanya istri masing-masing

⁵⁵ Saskia. E. Wieringa, 1999, *op.,cit.*, hlm. 146.

⁵⁶ Nani Soewondo, *op., cit.*, hlm. 204.

⁵⁷ Sukanti Suryochondro., *op., cit.*, hlm. 133-135. Fujinkai dalam bahasa Jepang merupakan organisasi perkumpulan perempuan yang bergerak dalam bidang yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang, misalnya mengunjungi tentara Jepang yang sakit, pemberantasan buta

kepala daerah dan harus menggerakkan tenaga-tenaga perempuan di tempatnya masing-masing. Kegiatan organisasi ini meliputi pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial. Kaum perempuan yang aktif dan giat dalam organisasi *Fujinkai* ini utamanya adalah para istri pegawai negeri.

Fujinkai dalam melakukan segala aktifitas kegiatan sejalan mengikuti garis hirarki suami. Tugas yang dibebankan kepada kaum perempuan yang tergabung sebagai anggota *Fujinkai* harus mempropagandakan cita-cita Jepang tentang “Asia Raya” di bawah pimpinan *Dai Nippon*.⁵⁸ *Fujinkai* merupakan salah satu organ-organ yang digunakan oleh pemerintah Jepang agar dapat mengerahkan seluruh rakyat Indonesia bekerja “suka-rela” demi kemenangan “perang suci” Jepang.

Ketika Putera akhirnya dilebur dalam organisasi baru yang dinamakan dengan “Jawa Hokokai” (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa), maka *Fujinkai* dijadikan bagian perempuannya dengan cabang-cabang didaerah-daerah.⁵⁹

huruf, mengurus dapur umum, bekerja dengan “sukarela”, menanam, dan membersihkan taman-taman.

⁵⁸ Lihat: Nunuk P. Murniati, *Getah Gender*, (Magelang: Indonesia Tera, 2004). hlm. 33. *Fujinkai* merupakan gerakan yang menjurus pada kesejahteraan bersama kaum ibu yang diselenggarakan dengan suasana perang. Maka organisasi *Fujinkai* berfungsi dan bermanfaat untuk membantu Jepang dalam perangnya. Dalam kegiatan sehari-hari, wanita yang menjadi *Fujinkai* dilatih memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan semacamnya. Sesuai dengan tujuan organisasi, maka keanggotaan *Fujinkai* lebih dipusatkan pada kelompok kampung atau dikaitkan dengan tempat tinggalnya untuk mendukung keberhasilan “Pembangunan Asia Raya”, di bawah pimpinan *Dai Nippon*.

⁵⁹ Nani Soewondo., *op., cit.*, hlm. 205. setelah organisasi Putera pada tanggal 1 Maret 1944 dilebur kedalam organisasi baru “Jawa Hokokai” (Himpunan Kabaktian Rakyat Jawa), maka dibentuk departemen perempuan dari Jawa Hokokai yang disebut dengan “Jawa Hokokai Fujinkai” dengan struktur pengurus pusatnya sebagai berikut: Ketua: Ny. Sunarjo Mangunpuspito, Wakil ketua I: Ny. Jos Wiriatmadja, wakil ketua II: Ny. Maskun, Penulis I: Ny. Maryati Adnan. Penulis II: Ny. Rosnah Jamin, Anggota: Ny. Siti Maryam, Pembantu: Ny. Sutarman, Ny. S.R. Tambunan, Ny. Artinah Samsudin, Ny. Hafni Abuhanifah.

Kegiatan *Fujinkai* dibatasi hanya pada urusan-urusan kewanitaan dan peningkatan keterampilan domestik selain kegiatan menghibur tentara yang sakit dan kursus buta huruf bagi para perempuan yang mempunyai wawasan luas. Pembatasan ini sangat merisaukan bagi mereka yang tidak ikut masuk *Fujinkai*. Oleh karena adanya pembatasan ini maka ada dua jenis orientasi di kalangan aktifis perempuan pada masa Jepang dalam mengagas perjuangan yaitu *pertama*, mereka yang berkooperasi dengan pemerintah bala tentara *Dai Nippon* dan *kedua*, mereka yang non-kooperatif serta memilih bergerak diam-diam dibawah tanah. Misalnya, Gerakan Wanita Sosialis (GWS) yang merupakan salah satu organisasi perempuan yang melakukan gerakan bawah tanah. Sehingga dampak yang terjadi banyak kaum nasionalis yang melakukan “aksi” tersebut ditangkap dan dibunuh oleh pemerintah Jepang.⁶⁰

Untuk penguatan serta kekuatan dari kepentingan pemerintah Jepang ketika menghadapi perang, kebijakan yang dibuat dengan membentuk pasukan tempur tentara perempuan yang dinamakan dengan “Barisan Srikandi”. Anggotanya terdiri atas anak-anak gadis berumur antara 15-20 tahun dan yang belum menikah. Mereka diberi pelatihan kemiliteran untuk dapat maju ke medan perang membela Jepang, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian juga dibentuk latihan-latihan militer bagi para gadis Indonesia bernama “*Sementai*”. Untuk bagian pemudanya diberi nama “*Seinendan*”. Dengan model latihan gerak

⁶⁰ Saskia. E. Wieringa, *Loc.,cit.*, hlm. 150-151.

badan atau *taigo* yang harus digalakkan.⁶¹ Dalam latihan kemiliteran di “*Seisendo*” juga diajarkan untuk menggunakan senjata.

Semua latihan-latihan kemiliteran yang pernah diberikan oleh bangsa Jepang kepada kaum perempuan hingga pada para pemuda-pemuda di Indonesia pada nantinya akan sangat bermanfaat dan dibutuhkan ketika bangsa Indonesia berjuang dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan tanah air. Pada masa pendudukan Jepang, seluruh kehidupan masyarakat Indonesia telah dimiliterisasi untuk kepentingan ekonomi perang Jepang dan untuk memperkuat angkatan perangnya dengan cara melatih tenaga-tenaga cadangan untuk dimobilisasi sewaktu-waktu dibutuhkan.⁶²

Pada periode kependudukan Jepang di Indonesia, sifat pergerakan perempuan mengalami kemunduran serta degradasi. Hal ini dikarenakan semua organisasi perempuan tidak dapat bergerak secara bebas serta hanya boleh berdiri apabila sudah ada komando dari penguasa dalam hal ini pemerintah Jepang. Akan tetapi, setelah Jepang mengalami kekalahan dari Sekutu pada perang dunia ke II serta adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, maka peran dari organisasi perempuan mengalami peningkatan kembali. Hal ini dibuktikan dengan turut sertanya kaum perempuan berjuang bersama kaum laki-laki dan bahu-membahu mengangkat senjata untuk bertempur dalam medan perang melawan pemerintah Belanda yang ingin berusaha merebut kembali Indonesia

⁶¹ [http://www.situs.kesrepro.info/gendervaw/2004/01/19/Pelangi Gerakan Perempuan Indonesia](http://www.situs.kesrepro.info/gendervaw/2004/01/19/Pelangi_Gerakan_Perempuan_Indonesia), KOMPAS, Senin, 19 Januari 2004, Diakses pada hari Jum'at, 1 Februari 2013, Pukul 15.00 WIB, hlm. 3.

⁶² Artikel: Syahfitri Anita, *Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah*, (Sebagai Pengantar Diskusi Lingkar Studi Perempuan, Jakarta, Jumat 7 April 2006, hlm. 3. Artikel tidak diterbitkan.

merdeka. Maka dinamika perkembangan perjuangan organisasi perempuan pada masa kemerdekaan Indonesia memasuki babak baru.

D. Organisasi Perempuan Pada Masa Kemerdekaan

Bangsa Indonesia pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, dihadapkan kepada upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu yang ingin menancapkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia merupakan komando bawahan dengan nama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI). Pada mulanya kedatangan pasukan Sekutu tersebut disikapi netral oleh pihak Indonesia, akan tetapi setelah diketahui bahwa kedatangan pasukan Sekutu tersebut ada maksud ingin membonceng *Netherlands Indische Civil Administration* (NICA) yang secara terang-terangan hendak menegakkan kembali kekuasaan di Hindia-Belanda, maka sikap Indonesia mulai berubah.⁶³

Kedatangan pasukan Sekutu di berbagai kota besar di Indonesia seperti halnya: Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya banyak menimbulkan insiden-insiden serta bahkan pertempuran-pertempuran antara pihak Sekutu dengan pihak Tentara Republik Indonesia.⁶⁴ Terjadinya pertempuran serta insiden antara pihak Sekutu dengan pihak Tentara Republik Indonesia karena pada setiap tempat yang dijadikan pendaratan tentara Sekutu kehadirannya selalu diikuti oleh tindakan-

⁶³ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.122.

⁶⁴ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan: Diplomasi dan Bertempur*, (Bandung: Angkasa, 1978), hlm. 68.

tindakan *provokasi* dan teror terhadap rakyat dan pemimpin-pemimpin bangsa ini dengan tidak menghargai kedaulatan Republik Indonesia.⁶⁵

Merujuk kepada pernyataan Ricklefs, terlihat jelas bahwa pasca Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia dihadapkan kepada suatu masa untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.⁶⁶ Adapun pada kurun waktu tersebut yaitu tahun 1945-1949 dinilai sebagai suatu masa yang penting bagi bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan pada masa itu terdapat usaha-usaha bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional bagi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, baik melalui saluran perjuangan fisik maupun jalur diplomasi.⁶⁷

Saluran perjuangan fisik atau berperang merupakan salah satu jalan yang ditempuh dalam upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam upaya tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan satu-satunya pihak yang dilibatkan, melainkan segenap rakyat Indonesia juga turut serta terjun ke medan tempur. Termasuk di dalamnya terdapat organisasi perempuan yang turut serta mengangkat senjata bertempur melawan tentara Sekutu.⁶⁸ Keikutsertaan para perempuan dalam perjuangan merupakan sebuah fenomena sejarah yang unik dan khas, ketika kaum perempuan terdorong hati nuraninya

⁶⁵ M.C. Ricklefs., *op., cit.*, hlm. 437.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 438.

⁶⁷ Antony Reid, *Revolusi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1996), hlm. 295.

⁶⁸ Dinas Sejarah Militer TNI AD, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat*, (Jakarta: Percetakan Offset Virgosari, 1972), hlm. 39.

untuk merebut dan mengangkat senjata dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air dari tangan penjajah yang lebih kuat segi persenjataannya.⁶⁹

Salah satu contoh keikutsertaan perjuangan pergerakan kaum perempuan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 adalah pertempuran yang paling dahsyat terjadi di Surabaya, pada tanggal 10 Nopember 1945, ketika seluruh rakyat terutama pemuda Surabaya menolak ultimatum Jenderal Mansergh dan tentara sekutu untuk menyerahkan semua senjata. Dalam suasana yang demikian, perempuan Indonesia merasa terpanggil untuk ikut berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan. Maka tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan menghimpun tenaga-tenaga kader agar siap-siaga mengadakan perlawanan terhadap penghalang kemerdekaan. Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh rakyat, termasuk pemudanya. Sehingga muncul lasykar Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) dibawah Pimpinan Lukitaningsih.⁷⁰

Perjuangan kaum perempuan di Surabaya diwadahi dengan terbentuknya Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) pada awal bulan September 1945 di

⁶⁹ Nani Soewondo., *op., cit.*, hlm. 206. Gambaran yang melukiskan suasana perjuangan para perempuan pada waktu permulaan zaman kemerdekaan tahun 1945 adalah kaum perempuan pada masa sebelumnya dapat mendobrak ikatan-ikatan adat dan tradisi yang sebelumnya menghambat gerak maju perempuan. Selain itu, penderitaan dan penghinaan selama penjajahan sudah cukup berat, dan kini, sewaktu masa perjuangan revolusi 1945 urusan-urusan yang tidak pokok tidak dihiraukan lagi. Seluruh rakyat merasa terpanggil untuk ikut berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan. Organisasi-organisasi perempuan pada masa tersebut lebih mengutamakan usaha-usaha perjuangan, baik di garis belakang dengan mengadakan dapur umum dan pos-pos Palang Merah, maupun di garis depan dengan nama suatu badan perjuangan maupun tergabung dengan organisasi-organisasi lain.

⁷⁰ Irna H.N, *Lahirnya Kelaskaran Wanita Dan Wirawati Catur Panca*, (Jakarta: Yayasan Wirawati Catur Panca, 1992), hlm.63. Pada masa Peristiwa 10 November 1945, PPRI juga mengemban tugas untuk memberikan perawat atau pertolongan P3K kepada tentara yang mengalami luka pada saat berhadapan dengan Sekutu serta menyuplai makanan di pos depan pertempuran. Hal ini terus berlanjut bahkan semakin banyak tugas yang diemban akibat kebutuhan peran semua elemen masyarakat sampai mundurnya pasukan dan rakyat dari wilayah Surabaya pada tanggal 28 November 1945.

Gedung Nasional Indonesia (GNI) Jalan Bubutan Surabaya. Usaha yang dilakukan PPRI adalah aksi pengibaran bendera merah putih di rumah-rumah, di kantor seluruh pelosok kota yang masih dikuasai Jepang, PPRI juga ikut serta bergerak mengadakan aksi corat-coret, penempelan-penempelan *plakat*, selebaran merah putih dan juga menjahit tanda pangkat BKR maupun TKR.⁷¹

Selain PPRI, ada juga organisasi-organisasi perempuan yang terkenal pada masa itu diantaranya adalah “Perwani” (Persatuan Wanita Indonesia) dan “Wani” (Wanita Negara Indonesia). Seperti dalam kebanyakan perjuangan kemerdekaan nasional, para laki-laki pemimpin nasional giat mencari dukungan dari kalangan perempuan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa: kaum perempuan dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-laki sehingga kaum perempuan pun berhimpun menyokong cita-cita perjuangan nasional.⁷² Artinya, pada periode masa kemerdekaan Republik Indonesia, pergerakan organisasi perempuan lebih aktif dalam membangun dan menempatkan kaum perempuan serta memperkuat negara yang baru merdeka.

E. Peran dan Keikutsertaan Perempuan Dalam Organisasi Kelaskaran

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Nani Soewondo., *op. cit.*, hlm. 206-208. Perkembangan selanjutnya pada bulan Februari tahun 1946 kongres organisasi perempuan diadakan di Solo. Dengan hasil kongresnya adalah peleburan kedua organisasi perempuan yaitu Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (Wani) menjadi satu badan fusi yang dinamakan dengan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Dalam situasi dan kondisi suasana perjuangan fisik maupun pada bidang sosial politik maka organisasi pergerakan perempuan mulai berbenah diri agar dapat menggalang persatuan dan kesatuan yang kuat dengan membentuk badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada awal bulan Juni tahun 1950 di Surabaya. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) diketuai Nyi Puger, dengan wakil ketuanya dijabat oleh Ny. Dr. Angka Nitisastra, serta penulis Ny. Irang, dan anggota luar biasa Ny. Samadikun.

Sesuai dengan kurun waktu serta seirama dengan derap perjuangan bangsa, perempuan selalu ikut serta dalam perjuangan. Akan tetapi, sesuai dengan suasana zaman, peran dan keikutsertaan kaum perempuan sangat beragam. Dalam suasana perang revolusi, perempuan di Indonesia merasa terpanggil untuk turut membela dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia, sehingga secara tidak langsung mulai bermunculan berbagai macam badan-badan serta organisasi perjuangan perempuan dan kelasykaran perempuan.

Sejak kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, kaum perempuan ikut serta dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Organisasi perempuan dan kelasykaran yang dibentuk pada masa kemerdekaan ini lebih ditujukan pada usaha membantu perjuangan dalam mengusir penjajah. Banyak kaum perempuan yang ikut berjuang di medan perjuangan. Contohnya, membantu Palang Merah Indonesia, mengurus dapur umum, serta memberi bantuan kepada para pengungsi. Selain itu, muncul lasykar-lasykar wanita dengan tugas-tugas mereka sangat luas: di garis depan, di medan pertempuran, melakukan kegiatan intel, jadi kurir, menyediakan dan mengirimkan makanan ke garis depan, dan memberi penerangan.⁷³

Organisasi kelaskaran perempuan merupakan organisasi rakyat yang bersifat militer dan turut berperan serta pada waktu bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Organisasi kelaskaran perempuan ini berjuang bersama-sama prajurit laki-laki di garis depan dan pada garis belakang menurut

⁷³ Saskia. E. Wieringa, *op., cit.*, hlm. 161-162.

pembagian tugas yang ditentukan oleh masing-masing organisasi kelasykarannya.⁷⁴

Peran dan keikutsertaan perempuan dalam organisasi kelasyakaran ditunjukkan ketika perempuan tampil di barisan depan bersama prajurit laki-laki dan berperan aktif dalam perjuangan revolusioner. Organisasi kelaskaran pertama yang dibentuk adalah Laskar Wanita Indonesia atau Laswi pada tahun 1945 oleh Ny. Aruji Kartawinata di Bandung. Anggota Laswi ini berasal dari para bekas Barisan Srikandi dan PPI (Pemuda Putri Indonesia).⁷⁵ Kaum hawa yang tergabung dalam wadah PPI (Pemuda Putri Indonesia) tersebut mampu membantu penduduk untuk mengungsi dan menyediakan makanan bagi pribumi. Ada juga organisasi kelaskaran lainnya yaitu PPRI (Pemuda Putri Republik Indonesia) yang mempunyai peran strategis demi menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa dengan terlibat aktif dalam mendirikan dapur umum untuk memberikan bantuan logistik (makanan) bagi para pejuang di front serta pengungsian. Selain itu, organisasi kelaskaran ini juga menghidupkan pos-pos P3K yang bertugas untuk menolong para pengungsi dan membentuk laskar-laskar putri di daerah-daerah.⁷⁶

Organisasi kelaskaran putri yang tergabung di BKR (Badan Keamanan Rakyat) atau Pemuda Republik Indonesia (PRI) berperan serta mengemban tugas untuk mengorganisir sumbangan-sumbangan berupa bahan makanan yang dapat

⁷⁴ Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Perjuangan Wanita Indonesia Sepuluh Windu Setelah Kartini 1904-1984*, (Jakarta: Deppen RI, 1984), hlm. 319-320.

⁷⁵ Saskia. E. Wieringa, *op., cit.*, hlm. 162.

⁷⁶ Artikel Mar'atul Uliyah, *Menguak Kebenaran Baru Peran Perempuan Dalam Sejarah*, <http://thenawalinstitutegarden.blogspot.com/2011/10/menguak-kebenaran-baru-peran-perempuan.html>. Diakses pada hari Jum'at, 26 April 2013, Pukul 19.00 WIB, hlm. 1.

diambil dari rumah-rumah penduduk dan mengirim bahan makanan mentah serta matang yang kemudian didistribusikan ke hampir seluruh kota dan membagikan makanan pemberian tersebut kepada para pejuang yang berjuang dalam medan peperangan.⁷⁷ Selain berperan di dapur umum organisasi perempuan kelaskaran ini juga ikut aktif dalam hal pemberian pelayanan kesehatan baik yang tergabung di Palang Merah Indonesia (PMI) atau laskar-laskar putri lainnya.⁷⁸

Peran organisasi kelasyakaran dalam *front* terdepan dengan memberikan pelayanan kesehatan di medan perang cukup membahayakan keselamatan jiwa. Sebagai petugas kesehatan harusnya mendapatkan perlindungan dari tembakan, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai petugas kesehatan sering mendapatkan berondongan peluru baik ketika berada dalam mobil ambulans atau pun di medan peperangan.⁷⁹

Peranan lain perempuan dalam organisasi kelaskaran adalah ketika perempuan juga ikut serta berperan sebagai prajurit, hal ini bisa dibaca dari kisah perjalanan Maryati Djaffar. Pada tahun 1944 beliau bertugas di Badan Pembantu Perjuangan (BPP) kemudian dipindahkan ke Badan Pembantu Keluarga Korban Perjuangan (BPKKP). Pada tahun 1945 beliau menjadi anggota penerangan di Batalyon Damarwulan di Blambangan Banyuwangi. Tugas yang beliau emban

⁷⁷ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan*, (Vol. II., Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung, 1978), hlm. 247.

⁷⁸Artikel MF. Mukthi, "Palang Merah Indonesia: Bertaruh Jiwa Demi Nyawa" http://www.historia.co.id/?=2&=1074/2012/9/17palang_merahindonesia-bertaruh_jiwa-deminyawa.html. Diakses pada hari Jum'at 26 April 2012.

⁷⁹*Ibid.*,

tersebut sangatlah berat yakni menyelamatkan dokumen-dokumen penting dan stempel perjuangan.⁸⁰

Pada tempat lain, tercatat sekitar 200 Putri Solo pada bulan Oktober 1945 juga berikrar menjadi prajurit yang tergabung dalam Laskar Putri Indonesia (LPI) Surakarta. Organisasi kelaskaran tersebut berada di sekian kota di Indonesia. Dalam organisasi ini mereka berlatih kemiliteran. Sama halnya dengan Laskar Wanita Indonesia (Laswi) seluruh anggota yang tergabung ke dalam organisasi ini harus tanggap dan mempunyai keahlian serba bisa dalam melakukan berbagai hal.⁸¹ Contohnya adalah menyamar untuk mengantarkan makanan ke Gunung Slamet dan ke tempat lain, membimbing anak-anak untuk mengungsi, mengadakan pemeriksaan terhadap para penumpang perempuan yang akan bepergian ke Stasiun Kereta Api di Purwokerto, membantu tugas PMI dan sekian pekerjaan lainnya.

Sementara itu, pada organisasi kelaskaran lain yang tergabung ke dalam organisasi Pemuda Putri Priangan cabang Priangan di bawah pimpinan wakil ketua Djoeningsih Abdul Muis yang mempunyai pengaruh besar dalam membangkitkan kesadaran cinta tanah air. Organisasi tersebut bertugas sebagai PMI dan dapur umum ketika meletus perang di daerah Bandung Selatan, yaitu Ciparay, Majalaya, danm Banjaran. Selain itu, PPI cabang Priangan ini juga menerjunkan para kader-kadernya untuk menduduki jabatan strategis di badan-badan legislatif (DPRD Priangan, Kowani, Dewan Pimpinan Pemuda Priangan,

⁸⁰ Mar'atul Uliyah, *op., cit.*, hlm. 4.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 5

BPKKP, dan MPPP).⁸² Peran Pemuda Putri Cabang Priangan ini juga mengurus kebutuhan pengungsi dan memberikan informasi selama perjalanan panjang rakyat Bandung (11 Km dari pusat kota) ketika Bandung meletus yang dikenang sebagai peristiwa Bandung Lautan Api.

Selanjutnya, pada saat terjadi pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, peran organisasi kelasyakran yang tergabung ke dalam Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) di bawah pimpinan Lukitaningsih sebagai ketuanya sangat signifikan. Hal tersebut tercermin dalam langkah serta kebijakan yang diambil untuk merespon keadaan kota Surabaya yang kian genting. Peran PPRI dengan membentuk kesatuan palang merah. “Berhubung pada waktu itu TKR dibentuk, prajurit kesehatan belum dapat disiapkan, maka kami bertugas sebagai Korps Palang Merah Putri,” tulis Lukitaningsih dalam “*Saham Revolusi*”, yang dimuat *Seribu Wajah: Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi* ’45.⁸³ Dalam program kerja awalnya, organisasi tersebut bergerak dalam bidang kelasyakaran, palang merah, dapur umum, dan bantuan bagi pengungsi. Palang Merah mereka bernama Palang Merah 45 dengan jumlah anggota sebanyak 52 pemudi dan relawan. Selain memberi pertolongan pertama pada korban pertempuran, Palang Merah 45 ini juga menyalurkan makanan dan pakaian serta menolong para pengungsi. Mereka mendapatkan pakaian-pakaian dari gedung-gedung timbunan Jepang yang telah mereka ambil alih, sedangkan untuk bahan

⁸² Irna H.N, *Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi* ’45. (Jakarta: Grasindo, 1995). hlm. 24. dalam artikel Djoeningsih Abdul Muis Turut Bertekad: “Merdeka atau Mati”

⁸³ *Ibid.*, hlm. 89.

makanan diperoleh dari dapur umum. Untuk keperluan obat-obatan, Palang Merah 45 mendapatkan bantuan dari Rumah Sakit Umum dan Palang Merah Indonesia.⁸⁴

Bentuk keikutsertaan PPRI dilakukan dengan mengirim anggota PPRI yang telah diberi pendidikan terlebih dahulu untuk membantu tentara republik. Dapat dikatakan demikian karena sebelumnya para anggota PPRI sudah diberikan latihan kemiliteran. Selain itu, PPRI juga membantu langsung dengan terjun ke masyarakat yang menderita akibat perang. Hal ini dilakukan dengan memberikan pertolongan secara fisik, yaitu dengan memberikan obat-obatan dan bahan makanan serta memberikan pengajaran pemberantasan buta huruf pada penduduk yang mengungsi disekitar daerah pertempuran seperti di Krian, Tulangan, Krembung, Sidoarjo, dan Bangsal, Batutulis, Mojosari Mojokerto. Seperti halnya organisasi-organisasi kelasykaran lainnya PPRI juga termasuk dalam bagian biro perjuangan di Surabaya, sehingga dalam melakukan kegiatannya PPRI tidak dilakukan secara sendiri-sendiri melainkan atas bantuan serta kerjasama seluruh masyarakat yang rela menjadi relawan.

⁸⁴ Lihat: “Bertaruh Jiwa Demi Nyawa” dalam, majalah Historia, No. I Tahun 2012, hlm. 135.